

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan ketahanan ekonomi suatu negara. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup aspek ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga mencakup aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan. Menurut Badan Pangan Nasional (*Bapanas*, 2023), konsep ketahanan pangan nasional meliputi empat dimensi utama, yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*), yang harus terpenuhi secara simultan agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Dalam konteks pembangunan nasional, ketahanan pangan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam menjamin hak dasar warga negaranya untuk memperoleh pangan yang layak. Apabila ketahanan pangan terganggu baik akibat bencana alam, krisis ekonomi, gangguan distribusi, maupun kebijakan yang kurang efektif maka risiko kelaparan (*hunger*), malnutrisi (*undernutrition*), serta ketidakstabilan sosial dan politik akan meningkat secara signifikan (*Badan Pangan Nasional, Statistik Ketahanan Pangan 2023*). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga ketersediaan dan distribusi

pangan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat di wilayah pedesaan.

Di tengah kondisi nasional tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berupaya memperkuat program ketahanan pangan melalui serangkaian kebijakan dan strategi yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah penyediaan benih dan pupuk bersubsidi bagi petani guna mendorong peningkatan produktivitas pertanian serta menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, yang menegaskan pentingnya subsidi input produksi agar biaya usaha tani tetap terjangkau oleh petani kecil dan menengah.

Pemerintah juga mengintegrasikan program ketahanan pangan dengan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan usaha tani, gudang penyimpanan hasil panen, dan pasar tani, agar rantai pasok pangan dari produsen ke konsumen dapat berjalan lebih efisien. Dukungan infrastruktur ini tidak hanya memperlancar distribusi, tetapi juga menekan biaya logistik dan kehilangan hasil (*losses*) akibat penanganan pascapanen yang kurang memadai.

Dalam konteks Kabupaten Tabalong, upaya penguatan ketahanan pangan juga tampak nyata melalui alokasi program cetak sawah rakyat yang dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperluas lahan produktif pertanian di daerah. Pada tahun 2025, Kabupaten Tabalong

memperoleh bantuan cetak sawah seluas 534 hektar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, khususnya komoditas padi sebagai bahan pangan pokok utama masyarakat. Program ini merupakan implementasi dari *Program Strategis Nasional Ketahanan Pangan 2025–2029* yang menekankan pada peningkatan ketersediaan dan kemandirian pangan daerah berbasis lahan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan resmi dari *Portal Pemerintah Kabupaten Tabalong (2025)*, kegiatan cetak sawah ini dilakukan secara bertahap di beberapa kecamatan potensial, termasuk Kecamatan Tanta, Haruai, dan Muara Uya. Lahan yang dijadikan lokasi merupakan lahan tidur dan semak belukar yang telah melalui proses verifikasi dan penilaian kesesuaian lahan oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBPPTP). Proses cetak sawah dilakukan melalui mekanisme padat karya yang melibatkan masyarakat setempat, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi petani lokal serta memberikan tambahan pendapatan sementara selama proses pembangunan berlangsung.

Di tingkat desa, implementasi program ketahanan pangan sering menghadapi tantangan lokal yang unik. Desa-desa di Tabalong mempunyai kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda, seperti jarak ke pusat distribusi, akses irigasi, dan kapasitas penyuluhan pertanian. Kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas bantuan, terutama bila ada hambatan dalam waktu penyaluran, mutu bantuan, dan kemauan petani untuk memanfaatkan bantuan.

Berdasarkan observasi awal di Desa Murung Baru dan Pemerangan Kanan, Kecamatan Tanta, program ketahanan pangan telah mulai dijalankan. Bantuan seperti benih, pupuk, dan sarana produksi lain telah disediakan oleh pemerintah daerah dan fasilitator program. Namun, muncul sejumlah fenomena masalah yang tampaknya menghambat tercapainya hasil optimal dari implementasi program tersebut yaitu:

1. Bantuan tidak tepat waktu

Fenomena yang muncul adalah bantuan pertanian yang tidak tepat waktu. Bantuan yang berupa benih padi dan jagung yang seharusnya diterima petani menjelang musim tanam, justru sering datang setelah masa tanam dimulai atau bahkan ketika lahan sudah ditanami. Kondisi ini menyebabkan bantuan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya. Akibatnya, sebagian petani terpaksa menggunakan benih lama atau membeli benih sendiri agar tidak kehilangan waktu tanam. Fenomena keterlambatan ini menunjukkan adanya kendala dalam koordinasi dan distribusi bantuan di tingkat pelaksana, sehingga efektivitas program menjadi berkurang. *(Sumber: Hasil Wawancara dengan Petugas Penyuluh Lapangan, Kantor Pertanian Kecamatan Tanta, 2025)*

2. Ketidaksesuaian kualitas benih antara apa yang tertera pada label dan kondisi benih yang diterima atau ditemukan di lapangan.

Berdasarkan keterangan PPL, sering kali benih yang diberikan tidak sesuai dengan standar mutu yang diharapkan, baik dari segi daya tumbuh maupun keseragaman varietas. Dalam beberapa kasus, benih yang diterima petani terlihat sudah menurun kualitasnya, bahkan ada yang menunjukkan

tanda-tanda tidak layak tanam. Ketidaksesuaian ini berpotensi menurunkan hasil panen dan berdampak pada kepercayaan petani terhadap bantuan pemerintah. *(Sumber: Hasil Wawancara dengan Petugas Penyuluh Lapangan, Kantor Pertanian Kecamatan Tanta, 2025)*

3. Sebagian petani tidak memanfaatkan bantuan secara optimal.

Meskipun pemerintah telah menyalurkan bantuan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, tidak semua petani memanfaatkannya secara optimal. Beberapa petani memilih untuk tidak menggunakan bantuan tersebut dengan berbagai alasan, seperti ketidaksesuaian waktu tanam, keraguan terhadap kualitas bantuan, atau keterbatasan pemahaman terhadap manfaat program. Hal ini menandakan bahwa tingkat partisipasi dan kesadaran petani terhadap tujuan program masih rendah, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intensif dari pihak penyuluh untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan.

(Sumber: Hasil Wawancara dengan Petugas Penyuluh Lapangan, Kantor Pertanian Kecamatan Tanta, 2025)

Secara keseluruhan, fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan implementasi program ketahanan pangan di Kecamatan Tanta bukan hanya terletak pada aspek penyediaan bantuan, tetapi juga pada aspek pelaksanaan, kualitas input, dan penerimaan masyarakat tani terhadap program tersebut. Dengan demikian, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme distribusi, pengawasan mutu bantuan, serta peningkatan komunikasi antara petani dan pihak penyuluh agar tujuan program ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Ketahanan Pangan, Pada Desa Murung Baru dan Pamarangan Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagaimana dijelaskan oleh Leo Agustino (2020:154-158), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi/Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Ketahanan Pangan Pada Desa Murung Baru dan Pamarangan Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk menganalisis Implementasi Program Ketahanan Pangan Pada Desa Murung Baru dan Pamarangan Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan bantuan oleh petani (mis. Informasi, kapasitas teknis, kecocokan bantuan dengan kebutuhan local, dan aspek sosial-ekonomi)

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan dan program ketahanan pangan di tingkat desa. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang efektivitas program bantuan pertanian dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, terutama dalam hal ketepatan waktu

penyaluran bantuan, kualitas benih, serta peningkatan pemanfaatan bantuan oleh petani agar program lebih efektif dan berkelanjutan.

- 2) Bagi Petani, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan bantuan pemerintah secara optimal guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
- 3) Bagi Akademisi atau Peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan rujukan dalam penelitian selanjutnya mengenai implementasi kebijakan publik di sektor pertanian dan ketahanan pangan.